

SBDK perbankan menurun pada Juni 2026 ditopang oleh efisiensi biaya overhead dan penyesuaian margin keuntungan di tengah meningkatnya biaya dana.

- ***Pada Juni 2026 SBDK perbankan turun disebabkan oleh efisiensi biaya overhead (OHC) dan penyesuaian margin keuntungan yang mengimbangi kenaikan biaya dana (HPDK).***
- ***Suku bunga kredit Rupiah dan suku bunga kredit baru meningkat pada Juli 2026 seiring dengan meningkatnya biaya pendanaan dan penyesuaian pricing kredit perbankan.***
- ***Suku bunga kredit sektor prioritas KLM tetap lebih kompetitif dibandingkan industri di tengah kenaikan suku bunga kredit, dengan risiko kredit yang relatif terjaga dan dukungan likuiditas dari insentif KLM.***

Perkembangan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)¹ Juni 2026

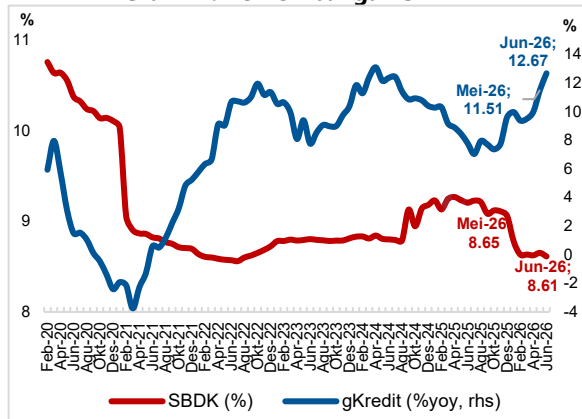
SBDK Juni 2026 menurun meskipun tekanan biaya dana yang meningkat. SBDK tercatat sebesar 8,61% pada Juni 2026, lebih rendah dibandingkan dengan 8,65% pada bulan sebelumnya (**Grafik 1**)². Penurunan tersebut menunjukkan bahwa perbankan masih menyerap kenaikan biaya dana melalui efisiensi operasional dan penyesuaian margin keuntungan untuk menjaga daya saing kredit. Di sisi lain, pertumbuhan kredit yang meningkat dari 11,51% (yoy) pada Mei 2026 menjadi 12,67% (yoy) pada Juni 2026 mendorong peningkatan kebutuhan pendanaan. Kondisi likuiditas yang lebih terbatas sejak awal tahun 2026 meningkatkan tekanan biaya dana sehingga mendorong perbankan untuk melakukan efisiensi agar SBDK tetap kompetitif dalam mendukung intermediasi.

Perkembangan SBDK antar kelompok bank cukup bervariasi, dipengaruhi oleh kondisi likuiditas dan struktur pendanaan masing-masing kelompok bank. SBDK kelompok BUMN menurun dari 8,84% pada Mei 2026 menjadi 8,80% pada Juni 2026, sementara BUSN turun dari 8,43% menjadi 8,37% (**Grafik 2**). Sebaliknya, SBDK kelompok BPD dan KCBA meningkat masing-masing dari 9,09% dan 5,16% menjadi masing-masing 9,13% dan 5,36%. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kelompok bank dengan biaya dana relatif rendah dan likuiditas yang lebih memadai memiliki ruang yang lebih besar untuk mempertahankan atau menurunkan SBDK, sementara kelompok bank yang mengalami tekanan pendanaan dan biaya operasional yang lebih tinggi cenderung membatasi ruang penurunan SBDK.

¹ SBDK merupakan suku bunga dasar kredit yang dipublikasikan oleh bank sesuai dengan Peraturan OJK No.13 Tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Kredit. SBDK digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan pada nasabah, namun belum mencakup premi risiko yang dapat bervariasi untuk setiap debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur secara umum tidak sama dengan SBDK. Periode asesmen menggunakan data SBDK yang tersedia hingga publikasi laporan.

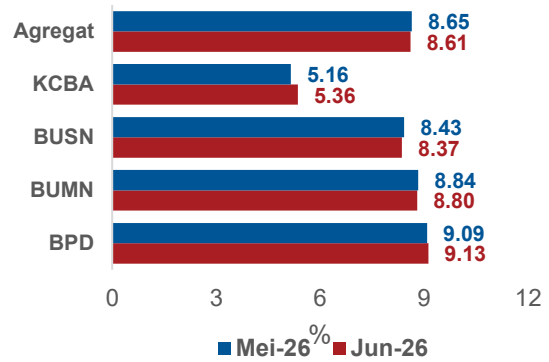
² Sejak Oktober 2024, komponen pembentuk SBDK mengalami perubahan dan penyesuaian sejalan dengan pengaturan dalam POJK No.13 Tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit. Selain itu, angka SBDK Oktober 2024, November 2024 dan Desember 2024 disajikan ulang sejalan dengan koreksi data yang disampaikan bank pelapor pada periode dimaksud.

Grafik 1. Perkembangan SBDK*



*Berdasarkan ketentuan baru dengan penyesuaian revisi bank
Sumber: OJK (diolah)

Grafik 2. SBDK* Berdasarkan Kelompok Bank

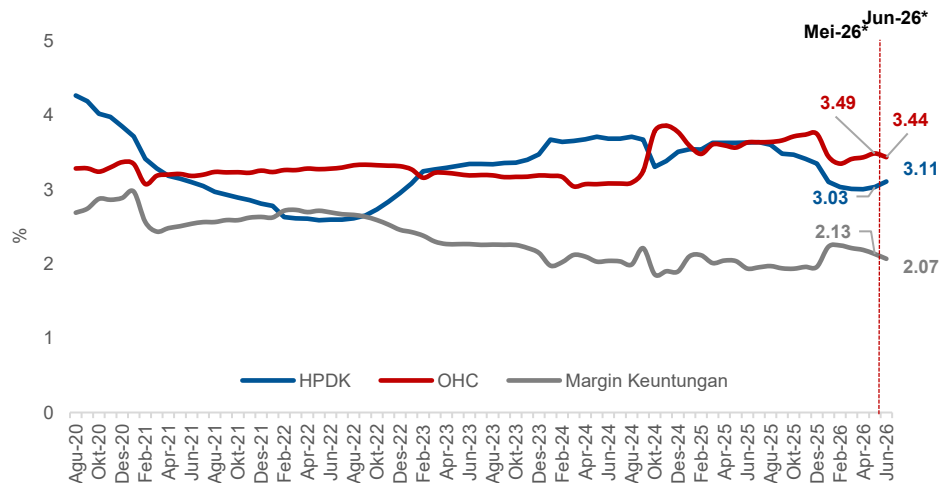


*Berdasarkan ketentuan baru dengan penyesuaian revisi bank
Sumber: OJK (diolah)

Perkembangan Komponen Pembentuk SBDK³

Penurunan SBDK pada Juni 2026 ditopang oleh efisiensi biaya operasional dan penyesuaian margin keuntungan yang mengimbangi kenaikan biaya dana. OHC menurun dari 3,49% pada Mei 2026 menjadi 3,44% pada Juni 2026, terutama didorong oleh penurunan biaya tenaga kerja serta beban barang dan jasa. Pada saat yang sama, HPDK meningkat dari 3,03% menjadi 3,11%, mencerminkan meningkatnya biaya pendanaan di tengah kompetisi penghimpunan dana. Untuk menjaga daya saing suku bunga kredit, perbankan turut menyesuaikan margin keuntungan dari 2,13% menjadi 2,07% (**Grafik 3**). Dengan demikian, efisiensi OHC dan penurunan margin keuntungan mampu mengimbangi kenaikan HPDK sehingga SBDK secara agregat tetap menurun.

Grafik 3. Perkembangan Komponen Pembentuk SBDK*



*Berdasarkan ketentuan baru dengan penyesuaian revisi bank
Sumber: OJK (diolah)

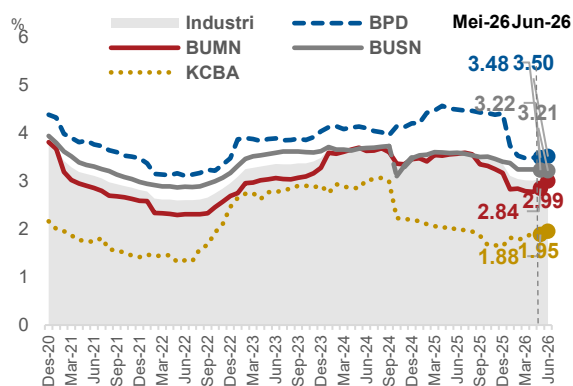
³ SBDK terdiri dari tiga komponen pembentuk, yaitu Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) yang terdiri dari DPK (Biaya DPK, Biaya giro wajib minimum, Biaya premi LPS) dan Biaya non-DPK (Biaya dana liabilitas kepada Bank Indonesia dan bank lain, Biaya surat-surat berharga yang diterbitkan, Biaya dana pinjaman yang diterima, dan Lainnya), Biaya overhead (OHC) yang terdiri dari Perubahan nilai wajar liabilitas, Kerugian risiko operasional, Komisi/provisi/fee dan administrasi, Penyusutan/amortisasi, Kerugian penurunan nilai aset nonkeuangan, Beban tenaga kerja, Beban promosi, Kerugian penjabaran transaksi valas, Beban lainnya, dan Biaya overhead lainnya, dan Margin keuntungan yang ditetapkan oleh bank dalam penyaluran kredit.

HPDK meningkat pada Juni 2026 seiring meningkatnya kompetisi penghimpunan dana di tengah kondisi likuiditas yang lebih terbatas. Mayoritas kelompok bank mencatat kenaikan HPDK, dengan peningkatan terbesar pada kelompok BUMN dari 2,84% pada Mei 2026 menjadi 2,99% pada Juni 2026 (**Grafik 4**). HPDK kelompok BPD dan KCBA juga meningkat masing-masing dari 3,48% dan 1,88% menjadi masing-masing 3,50% dan 1,95%. Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan biaya penghimpunan dana, khususnya deposito dalam merespon kenaikan suku bunga acuan. Sebaliknya, HPDK kelompok BUSN turun tipis dari 3,22% menjadi 3,21%, menunjukkan tekanan biaya dana yang relatif lebih terbatas terutama didukung oleh penurunan biaya tabungan dibandingkan dengan kelompok bank lainnya.

OHC perbankan menurun pada Juni 2026, terutama ditopang oleh efisiensi biaya tenaga kerja serta beban barang dan jasa pada kelompok BUMN dan BUSN. Secara industri, OHC turun dari 3,49% pada Mei 2026 menjadi 3,44% pada Juni 2026 (**Grafik 5**). Penurunan OHC terjadi pada kelompok BUMN dari 3,76% menjadi 3,69%, diikuti BUSN dari 3,16% menjadi 3,13%. Secara umum, penurunan OHC pada kedua kelompok bank tersebut bersumber dari penurunan biaya tenaga kerja serta beban barang dan jasa. Pada kelompok BUMN, efisiensi operasional turut didukung oleh penyaluran stimulus penempatan dana Pemerintah pada bank Himbara yang menekan biaya operasional terkait tenaga kerja maupun kebutuhan lainnya dalam mengakuisisi dana. Di sisi lain, OHC kelompok BPD dan KCBA meningkat masing-masing dari 3,62% dan 1,76% menjadi masing-masing 3,63% dan 1,88%, sehingga membatasi ruang penurunan SBDK pada kedua kelompok bank tersebut.

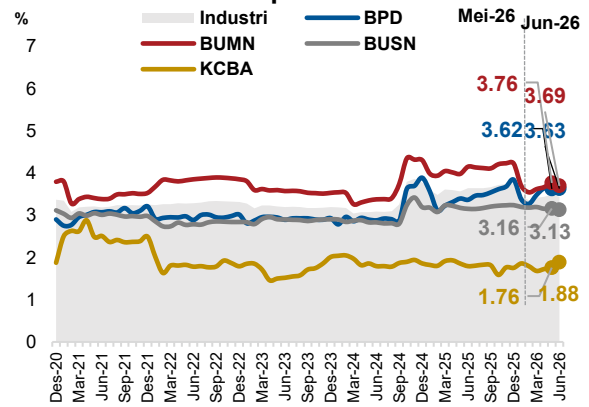
Margin keuntungan perbankan menurun pada Juni 2026 sebagai bagian dari penyesuaian *pricing* untuk menyerap tekanan kenaikan biaya dana dan menjaga daya saing kredit. Secara industri, margin keuntungan turun dari 2,13% pada Mei 2026 menjadi 2,07% pada Juni 2026 (**Grafik 6**). Penurunan terutama terjadi pada kelompok BUMN dari 2,24% menjadi 2,12% dan BUSN dari 2,05% menjadi 2,03%. Sementara itu, margin keuntungan kelompok BPD tetap terjaga sebesar 1,99%, sedangkan KCBA meningkat tipis dari 1,52% menjadi 1,53%. Ke depan, kemampuan perbankan menjaga efisiensi operasional dan mengelola biaya dana akan menentukan ruang penyesuaian margin dan suku bunga kredit.

Grafik 4. Perkembangan HPDK* Berdasarkan Kelompok Bank



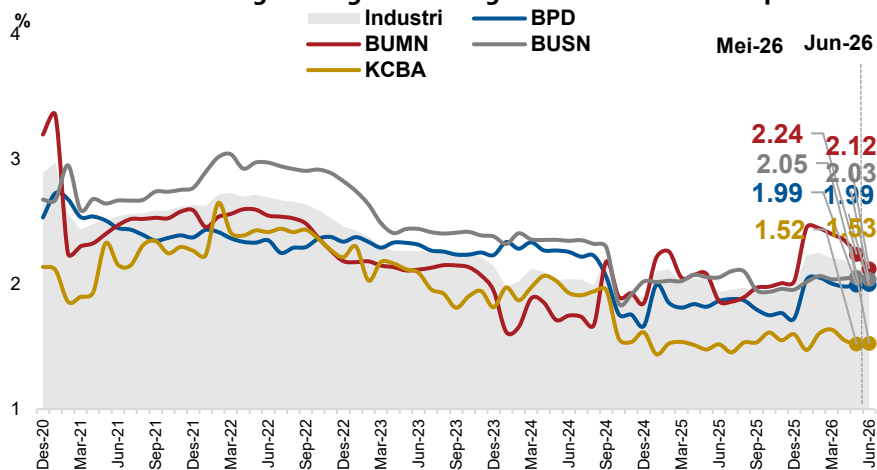
*Berdasarkan ketentuan baru dengan penyesuaian revisi bank.
Sumber: OJK (diolah)

Grafik 5. Perkembangan OHC* Berdasarkan Kelompok Bank



*Berdasarkan ketentuan baru dengan penyesuaian revisi bank.
Sumber: OJK (diolah)

Grafik 6. Perkembangan Margin Keuntungan* Berdasarkan Kelompok Bank



*Berdasarkan ketentuan baru dengan penyesuaian revisi bank

Sumber: OJK (diolah)

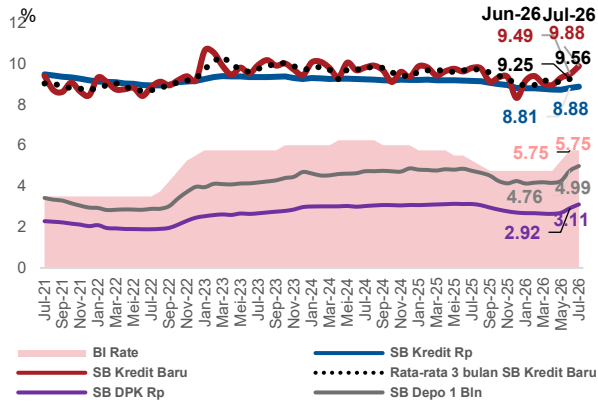
Perkembangan Suku Bunga Kredit

Suku bunga kredit Rupiah meningkat pada Juli 2026 seiring meningkatnya biaya pendanaan, yang mulai diteruskan ke *pricing* kredit baru. Rata-rata tertimbang suku bunga kredit Rupiah naik dari 8,81% pada Juni 2026 menjadi 8,88% pada Juli 2026 (**Grafik 7**), sejalan dengan kenaikan suku bunga kredit baru dari 9,49% menjadi 9,88%. Perkembangan tersebut mencerminkan respons perbankan terhadap meningkatnya biaya pendanaan dan kompetisi penghimpunan dana untuk memenuhi kebutuhan pendanaan kredit. Dengan pertumbuhan kredit yang tetap tinggi, tekanan biaya dana mulai diteruskan secara bertahap kepada debitur melalui penyesuaian suku bunga kredit baru.

Kenaikan suku bunga kredit baru terutama berasal dari kelompok BUSN, KCBA, dan BPD, sementara BUMN mencatat penurunan. Suku bunga kredit baru kelompok BUSN meningkat paling tinggi dari 10,99% menjadi 11,80%, diikuti KCBA dari 8,45% menjadi 9,20% dan BPD dari 8,62% menjadi 8,79% (**Grafik 8**), terutama dipengaruhi kenaikan suku bunga kredit baru pada segmen konsumsi. Sebaliknya, suku bunga kredit baru kelompok BUMN menurun dari 8,03% menjadi 7,87%, antara lain didukung penyaluran kredit program Pemerintah dengan tingkat suku bunga yang relatif rendah.

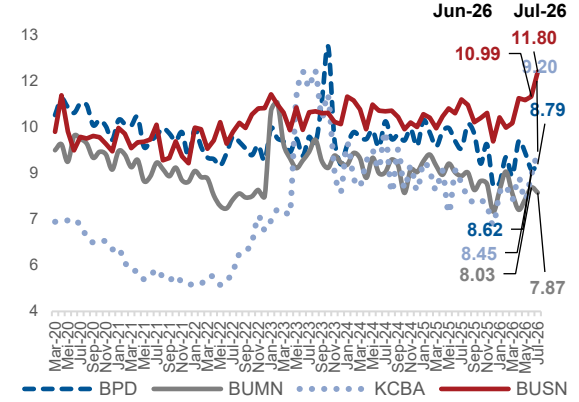
Kenaikan suku bunga DPK Rupiah mengindikasikan meningkatnya kompetisi penghimpunan dana untuk memenuhi kebutuhan likuiditas seiring pertumbuhan kredit yang tetap kuat. Suku bunga DPK Rupiah meningkat dari 2,92% pada Juni 2026 menjadi 3,11% pada Juli 2026 (**Grafik 7**). Peningkatan kebutuhan pendanaan kredit mendorong bank menawarkan *pricing* simpanan yang lebih kompetitif, sehingga meningkatkan biaya dana dan pada akhirnya mulai diteruskan ke suku bunga kredit. Dukungan likuiditas melalui bauran kebijakan Bank Indonesia turut membantu meredam tekanan kenaikan biaya pendanaan yang lebih besar.

Grafik 7. Perkembangan Suku Bunga Kredit Rp dan Suku Bunga DPK Rp



Sumber: LBUT Antasena (diolah)

Grafik 8. Perkembangan Suku Bunga Kredit Baru Rp Berdasarkan Kelompok Bank (%)



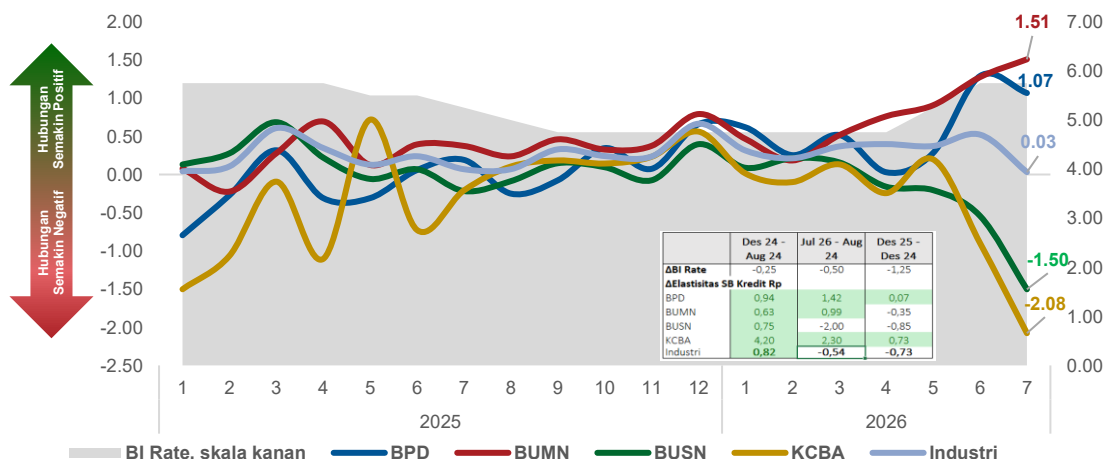
Sumber: LBUT Antasena (diolah)

Perkembangan Elastisitas Suku Bunga Kredit Baru

Transmisi perubahan suku bunga kebijakan ke suku bunga kredit baru cenderung masih terbatas dan bervariasi antar kelompok bank. Koefisien elastisitas industri perbankan tercatat sebesar 0,03 pada Juli 2026, lebih rendah dibandingkan dengan 0,07 pada periode yang sama tahun sebelumnya (**Grafik 9**). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perubahan suku bunga kredit baru relatif terbatas dibandingkan dengan perubahan suku bunga kebijakan sejak periode dasar pada Agustus 2024.

Respons antar kelompok bank berbeda, mencerminkan variasi kondisi likuiditas, struktur pendanaan, strategi *pricing*, dan profil risiko. Kelompok BUMN mencatat elastisitas positif, sejalan dengan penurunan suku bunga kredit baru pada mayoritas segmen kredit bersamaan dengan penurunan suku bunga kebijakan. Sebaliknya, kelompok BUSN dan KCBA mencatat elastisitas negatif karena suku bunga kredit baru meningkat, terutama pada segmen konsumsi dan UMKM, meskipun suku bunga kebijakan menurun dibandingkan dengan periode dasar. Pada kelompok BPD, penurunan suku bunga kredit terjadi di tengah perkembangan kualitas kredit yang perlu dicermati. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa transmisi suku bunga kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perubahan suku bunga acuan, tetapi juga oleh kondisi pendanaan, likuiditas, risiko kredit, dan strategi *pricing* masing-masing kelompok bank.

Grafik 9. Elastisitas Suku Bunga Kredit Baru Rupiah Berdasarkan Kelompok Bank



Keterangan:

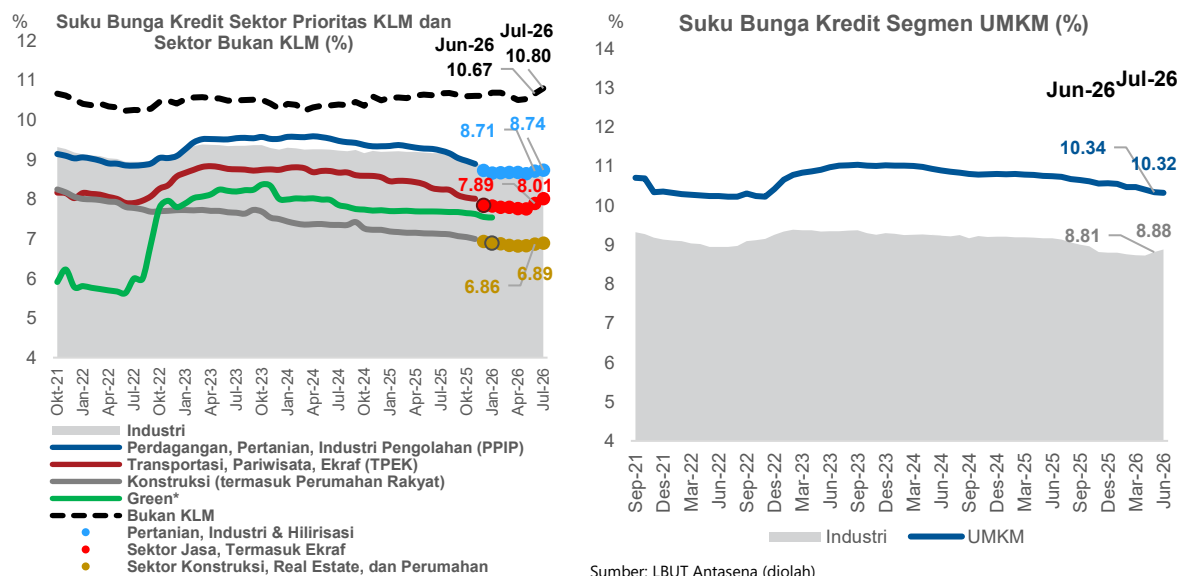
- Elastisitas dihitung dengan rumus = (% Perubahan SB Kredit Baru Rp) / (% Perubahan BI Rate)
- Periode dasar yang dipakai saat menghitung elastisitas adalah Agustus 2024, yakni awal periode penurunan BI Rate.

Suku Bunga Kredit Sektor Prioritas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM)⁴

Dukungan likuiditas melalui KLM turut menjaga suku bunga kredit sektor prioritas tetap kompetitif di tengah meningkatnya biaya dana dan suku bunga kredit perbankan. Pada Juli 2026, suku bunga kredit seluruh sektor prioritas KLM tetap berada di bawah rata-rata industri meskipun secara bulanan meningkat. Suku bunga kredit sektor Jasa termasuk Ekonomi Kreatif meningkat dari 7,89% menjadi 8,01%; sektor Pertanian, Industri Pengolahan, dan Hilirisasi dari 8,71% menjadi 8,74%; serta sektor Konstruksi, Real Estate, dan Perumahan dari 6,86% menjadi 6,89% (**Grafik 10**). Seluruhnya tetap lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata suku bunga kredit industri sebesar 8,88%. Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa dukungan likuiditas melalui KLM turut memberikan ruang bagi perbankan untuk mempertahankan *pricing* kredit sektor prioritas yang relatif kompetitif.

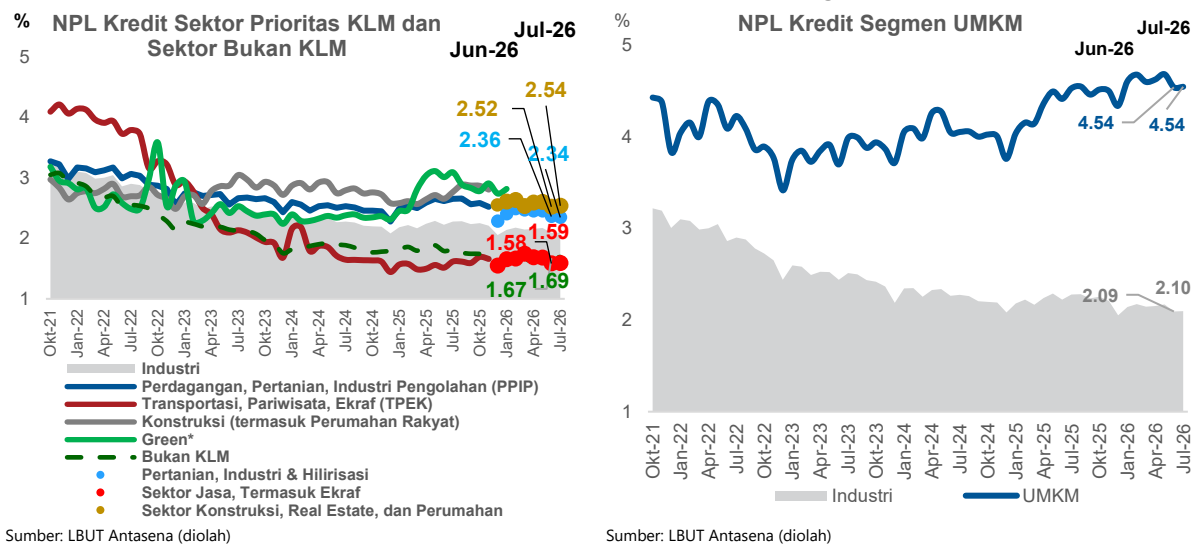
Kenaikan suku bunga kredit sektor prioritas KLM disertai kualitas kredit yang relatif terjaga, dengan rasio NPL seluruh sektor prioritas tetap berada di bawah 5% (Grafik 11**).** Pada segmen UMKM, suku bunga kredit turun tipis dari 10,34% pada Juni 2026 menjadi 10,32% pada Juli 2026, sementara NPL tetap sebesar 4,54%. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perbankan masih menjaga akses pembiayaan UMKM, namun tetap perlu menerapkan *pricing* dan pengelolaan risiko secara selektif sesuai profil risiko debitur.

Grafik 10. Perkembangan Suku Bunga Kredit Pada Sektor Prioritas KLM dan Segmen UMKM



⁴ Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) merupakan insentif yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan melalui pengurangan kewajiban giro bank di Bank Indonesia dalam rangka pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) yang wajib dipenuhi secara rata-rata. Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Makroprudensial. Sejak 1 Desember 2025, terdapat reklasifikasi sektor prioritas yang ditetapkan untuk memperkuat KLM antara lain: (1) sektor Pertanian, Industri & Hilirisasi; (2) sektor Jasa, termasuk Ekonomi Kreatif (Ekraf); (3) sektor Konstruksi, Real Estate, dan Perumahan. Selain sektor prioritas di atas, kebijakan KLM juga menyasar segmen UMKM dan Usaha Mikro (UMi).

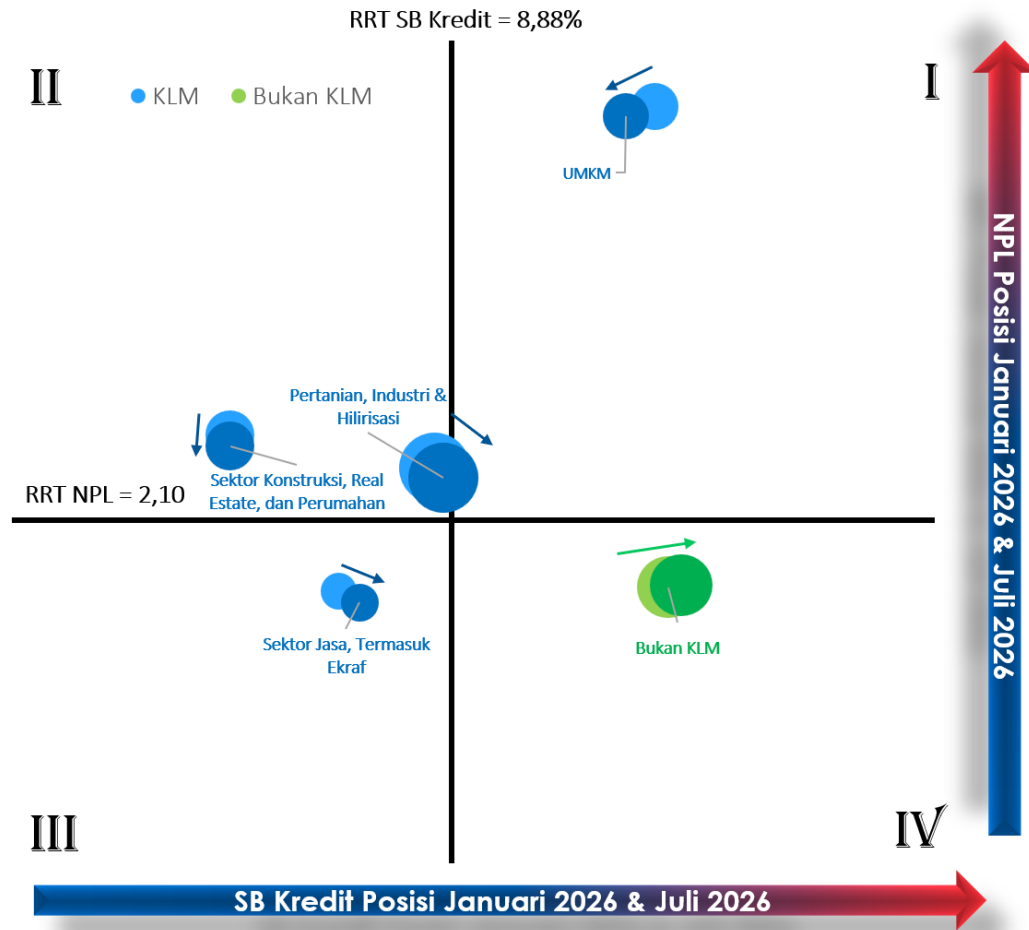
Grafik 11. NPL Kredit Sektor Prioritas KLM dan Segmen UMKM



Dalam enam bulan terakhir, suku bunga kredit mayoritas sektor prioritas KLM meningkat, namun tetap relatif kompetitif dengan risiko kredit yang terjaga. Dukungan kebijakan KLM *Forward Looking* turut memperkuat kapasitas likuiditas perbankan untuk menyalurkan kredit kepada sektor prioritas. Sebagian besar sektor prioritas KLM tetap berada pada kuadran II dan III (**Grafik 12**) meskipun tekanan biaya pendanaan meningkat, mencerminkan suku bunga yang relatif rendah dengan kualitas kredit yang secara umum terjaga. Secara agregat, suku bunga kredit sektor prioritas KLM juga tetap lebih rendah dibandingkan rata-rata industri, mengindikasikan peran KLM dalam menjaga pricing kredit tetap kompetitif dan mendukung intermediasi perbankan.

Sementara itu, sektor non-KLM berada pada kuadran IV dengan suku bunga relatif tinggi dengan NPL relatif rendah. Dalam enam bulan terakhir, suku bunga kredit sektor non-KLM meningkat dari 10,69% pada Januari 2026 menjadi 10,80% pada Juli 2026, sementara NPL meningkat tipis dari 1,68% menjadi 1,69%. Pada segmen UMKM, suku bunga kredit menurun di tengah risiko kredit yang relatif lebih tinggi dibandingkan industri. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan kualitas debitur dan penerapan manajemen risiko yang memadai agar akses pembiayaan UMKM tetap terjaga secara berkelanjutan.

Grafik 12. Kuadran Pemetaan Suku Bunga Kredit dan NPL Sektor Prioritas KLM



Kuadran I: suku bunga tinggi, NPL tinggi

Kuadran II: suku bunga rendah, NPL tinggi

Kuadran III: suku bunga rendah, NPL rendah

Kuadran IV: suku bunga tinggi, NPL rendah

Keterangan:

Ukuran *bubbles* menunjukkan pangsa kredit.

Arah panah pada *bubbles* menunjukkan pergerakan dari Januari 2026 ke Juli 2026

Sumber: LBUT Antasena (diolah)

Transparansi SBDK bertujuan memperkuat transmisi kebijakan moneter sekaligus mendukung kebijakan makroprudensial Bank Indonesia. Melalui transparansi, masyarakat dan dunia usaha memperoleh informasi mengenai perkembangan SBDK dan suku bunga kredit perbankan, sehingga mendorong pembentukan suku bunga kredit yang lebih kompetitif dan efisien serta mendukung permintaan kredit dan pertumbuhan ekonomi.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Bank Indonesia menerbitkan “Asesmen Transmisi Suku Bunga Kebijakan kepada Suku Bunga Dasar Kredit Perbankan”. Publikasi ini memberikan informasi mengenai perkembangan SBDK beserta komponen pembentuknya, yaitu Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK), biaya overhead (OHC), dan margin keuntungan. Transparansi tersebut diharapkan memperkuat pemahaman publik sekaligus mendorong tata kelola, disiplin pasar, dan kompetisi antarbank dalam pembentukan suku bunga kredit. Dengan demikian, *pricing* kredit diharapkan semakin efisien dan kompetitif dalam mendukung intermediasi dan perekonomian nasional.

Transparansi suku bunga kredit juga diterapkan di berbagai negara sebagai bagian dari praktik internasional. Malaysia, India, dan Tiongkok, antara lain, menerapkan publikasi *benchmark* suku bunga kredit melalui *Base Rate*, *External Benchmark Rate*, dan *Loan Prime Rate*. Selain itu, IMF juga mendorong penyediaan *Reference Lending Rate* dan *Reference Deposit Rate* sebagai bagian dari indikator untuk memantau perkembangan suku bunga dan kondisi sistem keuangan.